

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang organisasi HTI yang berambisi untuk merealisasikan sistem khilafah di bumi Pancasila. Keberadaan HTI secara ideologis maupun praktik sangat merusak marwah dari identitas bangsa Indonesia sebagai negara berpancasila. Eksistensi organisasi HTI menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan bangsa Indonesia yang majemuk. Di masa Reformasi aktivitas HT/ Hizbut Tahrir berubah menjadi sebuah organisasi yang mendapatkan legitimasi hukum dari Pemerintah sehingga terbentuknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Tujuan artikel ini hendak memotret bagaimana sejarah perkembangan HT sampai ke Indonesia? Bagaimana sikap pemerintah terhadap organisasi HTI di Indonesia? Bagaimana "roh" dari pengikut HTI menjalankan aksi propagandanya paska organisasi HTI dibubarkan oleh pemerintah. Untuk itulah, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif (kepuustakaan) yang menitikberatkan pada topik mengenai gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini ialah (1) Ideologi khilafah dibawa oleh M. Mustofa (Indonesia) dan Abdurrahman al-Baghdadi (Libanon) yang merupakan anggota HT berpusat di Yordania kemudian menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia, (2) Presiden Jokowi tahun 2017 resmi membubarkan organisasi HTI, (3) Ceramah yang berisikan narasi-narasi yang anti terhadap pemerintah maupun Pancasila yang dibangun oleh penceramah HTI di masjid-masjid, memanfaatkan fasilitas demokrasi maupun kebebasan berekspresi diruang publik untuk mensosialisasikan wacana khilafah dengan berlingkungan dibalik dakwah.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, NKRI, dan Pancasila

This article examines the HTI organization whose ambition is to realize the caliphate system in Pancasila land. The existence of HTI is ideologically and practically very destructive of the spirit of the identity of the Indonesian nation as a state with schemes. The existence of the HTI organization raises concerns for the future of a pluralistic Indonesian nation. During the Reformation era, HT / Hizbut Tahrir's activities turned into an organization that received legal legitimacy from the Government so that the Hizbut Tahrir Indonesia organization was formed. The purpose of this article is to capture how the history of HT development reached Indonesia? What is the government's attitude towards HTI organizations in Indonesia? How did the "spirit" of HTI followers carry out their propagandistic actions after the HTI organization was dissolved by the government. For this reason, the method used in this research is a qualitative method (literature) which focuses on the topic of the Hizbut Tahrir movement in Indonesia. As a conclusion in this study are (1) The ideology of the caliphate brought by M. Mustofa (Indonesia) and

Abdurrahman al-Baghdadi (Lebanon) who are members of HT based in Jordan then spread the ideology of the caliphate in Indonesia, (2) President Jokowi in 2017 officially disbanded HTI organizations, (3) Lectures containing anti-government and Pancasila narratives built by HTI preachers in mosques, utilizing democratic facilities and freedom of expression in public spaces to socialize caliphate discourse by taking cover behind preaching.

Keywords: Hizbut Tahrir Indonesian, NKRI, and Pancasila

Pendahuluan

Sejak era reformasi bergulir di Indonesia tantangan terhadap rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia menghadapi sebuah ancaman serius. Mengapa demikian? Sebab di era reformasi ini negara memberi ruang yang luas bagi masyarakat sipil untuk mendirikan partai politik maupun ormas yang berbasis agama. Sebab era reformasi merupakan respons terhadap masa orde baru yang sangat membatasi kebebasan berekspresi. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kalangan para pengikut Hizbut Tahrir yang keberadaannya sudah ada sejak di era orde baru namun tidak secara terang-terangan tampil di ruang publik untuk memperjuangkan sebuah pengakuan atau legitimasi hukum dari pemerintah. Singkatnya, upaya tersebut membuahkan hasil yang baik sehingga terbentuknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia/HTI. Sejak awal keberadaan organisasi HTI secara ideologis berlawanan dengan Pancasila namun yang disesalkan organisasi ini justru mendapatkan sebuah legitimasi hukum dari pemerintah bahkan pergerakan dari organisasi HTI ini seakan-akan dibiarkan bergerak secara leluasa selama 19 tahun waktu yang cukup lama mereka menyebarkan ideologi Khilafah.

Melalui latarbakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka adapun beberapa pertanyaan yang akan diulas di dalam artikel ini yaitu: Bagaimana sejarah perkembangan Hizbut Tahrir sampai ke Indonesia? Bagaimana sikap pemerintah terhadap organisasi HTI di Indonesia? Bagaimana “roh” pengikut HTI menjalankan aksi propagandanya paska organisasi HTI dibubarkan oleh pemerintah?

Metode Penelitian

Metode penelitian dengan judul “Roh Hizbut Tahrir di Bumi Pancasila” adalah penelitian kualitatif (berdasarkan literatur buku maupun jurnal) yang bersifat deskriptif dan bertujuan mengeksplorasi realitas sosial yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia. Peneliti dapat menemukan data historis mengenai sejarah Hizbut Tahrir, ideologinya, perkembangannya sampai ke Indonesia sampai kepada upaya untuk mengatasi berbagai bentuk aktivitas propaganda HTI paska dibubarkannya oleh pemerintah. Diharapkan dengan pendekatan metode kualitatif setiap pembaca dapat memahami maksud dari tujuan artikel ini ditulis.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah pada 3 Maret 1924 tidak membuat patah semangat umat Islam untuk tetap menjalankan ambisi politiknya. Pada 1953 didirikanlah lembaga politik berskala internasional yang bernama Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin al Nabhani di Quds, Palestina. Hizbut Tahrir bukanlah sebuah organisasi kerohanian, melainkan organisasi politik yang bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum *kufur*, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara Barat. Selain itu kemunculan Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali Daulah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintah dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.¹ Semenjak terjadinya perang dunia I dan II, keadaan yang semula hidup dalam sistem dan kultur Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan adanya aksi pendudukan negara-negara Barat, mulai dari Jazirah Arab, Afrika dan kawasan Asia Tenggara. Penduduk ini tidak saja mengambil alih kekuasaan, akan tetapi juga berbagai upaya negara Barat untuk meruntuhkan simbol kekuasaan kaum Muslim. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan doktrin nasionalisme.²

Pada awal berdirinya partai Hizbut Tahrir ini menargetkan 13 tahun untuk lahirnya negara khilafah baru di era modern. Ketika masa itu pun berlalu, sementara negara yang dicita-citakannya tak kunjung berdiri. Akhirnya ia menargetkan kembali dalam kurun waktu tiga dasarwarsa. Tetapi hingga saat ini pun tak satu negara pun diproklamasikan sebagai negara khilafah.³ Justru dengan ambisi politik seperti itu membuat negara-negara di Timur Tengah dengan latar belakang Islam mengalami perang saudara semisal di Suriah. Adakah yang diuntungkan dalam peperangan ini? Mungkin saja ada yaitu perusahaan yang memproduksi persenjataan militer. Secara keseluruhan baik pihak pemberontak maupun pihak pendukung pemerintahan tidak ada yang diuntungkan bahkan yang ada kerugian yang mereka terima seperti banyak korban yang meninggal dan juga melumpuhkan segala bidang kehidupan. Dalam ceramahnya Eben Timo mengatakan secara historis bahwa sistem politik yang dibangun atas dasar agama atau sistem teokrasi tidak mampu bertahan lama.⁴ Apalagi di tengah arus modernisasi yang sangat pesat saat ini yang berlangsung hampir dibelahan dunia ini di mana setiap manusia mengalami perjumpaan agama maupun budaya yang

¹ Mohammad Makmun Rasyid, *Sejarah dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, <http://digilib.uinsby.ac.id/19150/7/Bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

² *Ibid.*

³ Zainul Mu'ien Husni, *NU di tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional* (Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02 No.1, 2018), 45-59.

⁴ *Ceramah Kuliah Pascasarjana bersama Ebenheizer Nuban Timo* (Jakarta: STT Cipanas, 20 September 2018).

dipengaruhi oleh perpindahan penduduk, aktivitas politik, ekonomi, sosial, maupun agama.

Kemudian bagaimana sejarah Hizbut Tahrir/HT bisa masuk ke Indonesia? HT mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1982-1983 yang dibawa melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota HT dari Yordania sehingga dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan perluasan wilayah oleh HT yang berpusat di Yordania. M. Mustofa adalah putra pengasuh pondok pesantren Al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) serta Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mustofa adalah alumnus perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia.⁵

Selama ia belajar di Yordania, Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir disana. Pada mulanya, keterlibatannya dalam partai ini diawali dengan ketertarikannya kepada buku-buku karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir. Ia telah diperkenalkan dengan salah satu buku Taqiyuddin haarah Al-Islamiyah oleh ayahnya sendiri sebelum ia berangkat ke Yordania pada tahun 1979. Ketika sampai di Yordania secara tidak sengaja ia bertemu dengan para aktivis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku Taqiyuddin lebih lengkap. Setelah membaca buku-buku tersebut Mustofa berkesimpulan Taqiyuddin adalah mujtahid (pejuang muslim) besar pada abad ini.⁶ Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di gerakan Hizbut Tahrir di Libanon sejak usia 15 tahun. Ia berasal dari keluarga aktivis Hizbut Tahrir. Keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga Negara Australia. Ia kemudian berkenalan dengan Abdullah bin Nuh yang ketika itu menginap di keluarga Abdurahman selama berada di Australia. Ketika itu Abdullah sedang mengunjungi anaknya yang belajar disana. Dalam dialog dan diskusi intensif, Abduloh, seorang dosen di UI, tekesan Al-Baghdadai yang saat itu masih berusia 25 tahun maka ia diajak pindah ke Indonesia pada tahun 1981 dan kemudian menjadi anak angkat Abduloh dan membantunya mengembangkan pesantren Al-Ghazhali Bogor. Pada saat mengajar di pesantren ini ia berinteraksi dengan mahasiswa IPB yang aktif mengembangkan kegiatan keislaman di Masjid Al-Ghifari kampus IPB. Di tengah interaksi inilah Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para aktivis masjid Al-Ghifari.⁷ Pada tahun 1982 Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti satu semester. Dalam kesempatan ini ia memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa IPB yang memang sejak lama mengaji kepada ayahnya dan memberikan kepada mereka buku-buku karya para ulama Hizbut

⁵ Azman, *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia: Al-daulah* (Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 7 No.1, 2018), 99-113.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Tahrir. Mahasiswa IPB yang diajarkan oleh Mustofa kemudian tertarik dengan pemikiran Hizbut Tahrir kemudian mereka menjadi motor penggerak dari gerakan ini.

Semenjak kedatangan gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup selama 10 tahun. Hal ini disebabkan karena HT lahir di bawah pemerintahan rezim Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak ber-ideologi Pancasila. Paska orde baru, HT bisa melakukan aktivitasnya secara terbuka, hal ini ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka tentang syariah ke berbagai daerah seperti ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan gagasan khilafah ke berbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun demikian, perkembangan HTI masih dalam proses pengembangan kader (tasqif) dan pembinaan umat dalam rangka memperkuat partai.⁸ Pada 12 Agustus 2007, Hizbut Tahrir Indonesia sedang mengadakan rapat raksasa di Senayan menuntut direalisasinya sistem Khilafah yang meliputi seluruh dunia. Inilah klaim bahwa hanya dengan menerapkan syariat Islam umat manusia dapat ditolong dari berbagai malapetaka yang dialaminya.⁹ Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilarang di beberapa negara (Islam) ikut menggeliat. Di negeri kita HTI memperoleh pengikut yang tidak bisa diremehkan. Di negeri kita HTI memperoleh pengikut yang tidak bisa diremehkan. Kampus-kampus menjadi sasaran HTI sebagaimana misalnya terlihat dalam “deklarasi” yang pernah disampaikan oleh sejumlah mahasiswa IPB. HTI juga telah memasuki berbagai lapisan masyarakat. Semua ini sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa kita. Masuk akal kalau gerakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada pencegahan. Kalau tidak bangsa dan negara ini akan hancur berkeping-keping.¹⁰

Ahmad Syafii'i mencatat delapan indikator tingkat radikalisme di Indonesia. (1) Benci kepada pemerintah Indonesia karena tidak menjalankan Syariat Islam; (2) Menolak lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hormat Bendera; (3) Ikatan emosional kelompok mereka lebih kuat daripada ikatan emosional dengan keluarga/kampus/pekerjaan; (4) pengajian dan kaderisasi tertutup di lorong-lorong/sudut-sudut (isolasi diri); (5) harus membayar untuk menebus dosa-dosa; (6) mengenakan pakaian yang khas (katanya sesuai dengan ajaran Islam); (7) Umat Islam di luar kelompok adalah fasik dan kafir sebelum mereka hijrah (bergabung dengan kelompok ini); (8) Enggan mendengar ceramah di luar kelompoknya walaupun pengetahuannya tentang Islam masih sangat terbatas.¹¹

⁸ Nilda Hayati, *Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living al-Quran Perspektif Komunikasi: Episteme* (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 12 No. 1, 2017), 169-200.

⁹ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 134.

¹⁰ Andreas A. Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: Pengalaman dengan Allah dalam Konteks yang Berpancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 404.

¹¹ *Ibid.*, 273.

Di sisi lainnya ialah Hizbut Tahrir tidak terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata meskipun berada dibawah tekanan pemerintah. Kegiatan utama mereka menyebarkan pemikiran Islam dan memperkuat aqidah dan ideologi Islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai kegiatan dakwah.¹² Bagi peneliti gerakan politik HTI termasuk ke dalam kategori gerakan radikal. Mengapa? Selama ini HTI merasa tidak puas dengan dasar negara di negara Indonesia Pancasila dan juga sistem demokrasi di negeri ini yang dinilai tidak islami. Ketidakpuasaan ini kemudian direalisasikan dengan melakukan cara-cara yang inkonstitusional artinya adanya unsur pemaksaan yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis untuk mendesak mengganti sistem negara Pancasila dengan sistem khilafah.

HTI jelas menolak konsep kenegaraan (nation-state) sebab sejak awal HTI bercita-cita ingin membuat lembaga yang bersifat tunggal berskala internasional yang artinya melampaui batas-batas wilayah/negara (transnasional) dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia dan kemudian mereka mengikatkan diri pada satu lembaga dan sistem payung hukum yang sama yang disebut syariat Islam. Sistem politiknya ini disebut khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang terpilih.¹³ Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisa bahwa sejak zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq di Jazirah Arab sampai Kesultanan Utsmaniyah Ottoman di Turki Islam mengalami kejayaan politik, agama, maupun militer. Tetapi sejak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada 3 Marer 1924 oleh Barat Islam mengalami kemerosotan sampai dengan saat ini. Bagi kelompok HTI kemerosotan Islam disebabkan karena Islam sudah banyak mengadopsi nilai sekuler yang berasal dari Barat. Solusi untuk memulihkan kemerosotan Islam yaitu dengan mendirikan sistem Khilafah di bumi Indonesia. Sebab bagi mereka keberhasilan Islam di masa silam karena Islam menerapkan sistem khilafah dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman mereka. Untuk itulah sampai detik ini aktivis HTI terus memperjuangkan agar terwujudnya sistem Khilafah di Indonesia. Kalau sistem khilafah dipaksakan maka Indonesia akan mengalami apa yang sekarang dialami oleh Suriah. Jika ada pihak yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia silakan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna menjadikan wilayah di Nusantara menjadi satu bangsa dan negara bukan perkara mudah apalagi dahulu perasaan nasionalisme di Indonesia bersifat kedaerahan. Selain daripada itu sejarah telah membuktikan bahwa negara yang menjadikan syariat agama sebagai dasar pedoman dalam kehidupan bermasyarakat ternyata tidak mampu bertahan lama. Masyarakat sipil meyakini bahwa Pancasila adalah rumah bersama bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat yang

¹² Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2012), 23.

¹³ Arthur Aritonang, *Kekristenan dan Nasionalisme di Indonesia* (Jurnal Amanat Agung, Vol. 15 No. 1, 2019), 111-141.

lahir dari pergumulan konteks Indonesia yang majemuk. Ideologi Pancasila sangat melindungi serta menghormati keberadaan setiap agama, suku maupun budaya yang berbeda-beda yang dipunyai oleh bangsa di Indonesia.

Pembahasan

Kejayaan Islam dan Keruntuhannya

Politik sejak awal melekat dalam perluasan Islam. Pada saat Nabi Muhammad berada di Madinah, ia telah membangun komunitas sosial-keagamaan sebagai embrio pembentukan negara yang merupakan visi kenabiannya. Nabi Muhammad membuat aturan yang mengatur kewajiban masyarakat baru (ummah) yang multidimensi merupakan muara visi kenabiannya. Ketika itu masyarakat yang tadinya terpilah dalam suku dan kabilah berubah total menjadi komunitas baru melebihi komunitas rohanian (agama) belaka melainkan komunitas politik dimana di dalam agama menyatu dengan politik yang melahirkan sebuah imperium dunia dari Arabia, Timur Tengah sampai sebagian Eropa dalam waktu yang amat cepat. Hal ini didukung oleh kondisi awal sebagai penduduk kultur Arab yang telah menyebar berabad-abad sebelum Islam. Implementasi sosial-politik yang dikawal oleh hukum agama ketat (syariah) dipercayai adalah berakar pada wahyu ilahi (Al-Quran) dan ajaran nabi (Sunnah).¹⁴

Selama sepuluh abad imperium Islam menguasai panggung politik dunia sambung-menyambung mulai dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Usmaniyah (Ottoman). Dominasi Eropa mulai mengambil alih panggung seiring dengan penaklukan wilayah-wilayah Timur Tengah, Asia Barat dan Selatan yang tadinya digenggam oleh penguasa Muslim satu per satu takluk pada politik kolonialisme Barat di abad XIX. Kebanggaan dan percaya diri umat Islam goyah sebab keyakinan diri sebagai “umat terbaik” tidak bisa dilepaskan dari kejayaan politik. Kejayaan politik merupakan bukti penganut agama yang telah Allah tetapkan sebagai agama yang paling benar. Kaum Muslim memandang wadah politik bukan jahat pada dirinya; justru pemerintahan Allah dijalankan melalui negara. Tuhan menghendaki adanya negara dan wadah politik untuk memajukan Islam dan alat menjalankan hukum-Nya, untuk meluaskan syariat ke seluruh aspek kehidupan.¹⁵

Hapusnya imperium dinasti Usmaniyah benar-benar mengguncang batin umat Islam sebab kendali politik dipegang oleh Barat yang pernah mereka taklukan. Sampai saat ini banyak kaum Muslim masih terjebak pada kenangan romantis kejayaan masa lalu.¹⁶ Apa penyebab runtuhnya dinasti Islam? Alasannya karena kekuasaan terlalu terpusat, korupsi, politik mereka tertaut-taut dengan intrik-intrik kekuasaan dan mereka tidak mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di dunia. Pada akhirnya mereka tidak islami dan juga tidak modern. Kekhalifahan

¹⁴ Einar M. Sitompul, *Dinamika Islam Indonesia: Model Perjumpaan dengan Umat Islam, dalam Misi Baru Kemajemukan Teologi Lintas-Iman dan Lintas-Budaya Buku Penghormatan 80 Tahun Prof. Dr. Olaf Schumann* (Tomohon: UKIT Press, 2018), 170-171.

¹⁵ *Ibid.*, 171-172.

¹⁶ *Ibid.*

sebenarnya ideologi politik bukan gerakan keagamaan. Jargon-jargon agama hanyalah baju luar, sedangkan sejatinya adalah gerakan politik yang pada akhirnya berhadapan dengan negara.¹⁷ Sejarah mencatat bahwa konsep Khilafah terbagi menjadi 2 periode, periode pertama khalifah sebagai penerus ajaran Nabi Muhammad SAW yang diisi oleh para Khulafa ar-Rasyidin seperti Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sementara pada periode kedua ini diawali dengan berdirinya Khilafah Bani yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sampai Kekhalifahan Utsmani.

Sistem Khilafah pada periode kedua ini dipimpin pertama kali oleh Muawiyah tetapi kenyataannya beberapa wilayah Islam tidak mengakui Kekhalifahannya oleh karena Muawiyah mengklaim diri sebagai khalifah.¹⁸ Pada masa al-Khulafah al-Rasyidun sistem negara tidak lagi berbentuk teokrasi tetapi “nomokrasi Ketuhanan” yang diwujudkan dalam supremasi syariah, peran masyarakat menjadi lebih besar [demokrasi]. Pada masa itu kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah, bahkan rakyat dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya di hadapan para khalifah dengan bebas termasuk mengoreksi pendapat khalifah yang salah dan rekrutmen kepemimpinan pun lebih didasarkan pada faktor kapasitas individual. Sedangkan masa setelah al-Khulafa al-Rasyidun karakteristik ini kemudian berubah. Rekrutmen kepemimpinan tidak lagi berdasarkan pilihan masyarakat (umat), tetapi atas dasar keturunan yang ditentukan oleh kepala negara sebelumnya.¹⁹ Selain itu secara umum setelah periode al-Khulafa al-Rasyidun secara umum Khalifah/kepala negara menjadi sangat dominan, tidak hanya memegang, kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan legislatif dan yudikatif.²⁰

Namun yang menjadi kesamaan ialah pada masa kekhalifahan dari masa al-Khulafa al-Rasyidun sampai menjelang akhir Dinasti Utsmani akhir abad ke-19 yang memiliki struktur religio-politik, lembaga legislatif pada dasarnya dipegang oleh ulama. Mereka memiliki kemandirian dalam berijtihad menetapkan hukum-hukum, meskipun dalam praktiknya kadang-kadang juga tidak terlepas dari pengaruh negara (pemerintah).²¹

Kemudian apakah yang membuat Islam berjaya ketimbang Barat ketika itu? Philip K. Hitti dalam bukunya *History of Arabs* menjelaskan bahwa sejarahnya kejayaan Islam bisa terwujud bukan hanya karena kebudayaan Arab yang sudah tersebar luas sebelum Islam tetapi juga disebabkan karena umat Islam menyerap ilmu pengetahuan. Antara abad ke-9 dan 12 semakin banyak karya filsafat, kedokteran, sejarah, agama, astronomi, dan geografi yang ditulis dalam bahasa

¹⁷ *Ibid.*, 11

¹⁸ Philip K. Hitti, *History of Arabs; From the Earliest Times to the Present* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 222-240.

¹⁹ Masykuri Abdullah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 77-78.

²⁰ *Ibid.*, 174-175.

²¹ *Ibid.*, 78.

Arab dibandingkan bahasa-bahasa lain. Hal ini dimulai ketika kemenangan tentara Islam pada masa al-Mahdi (Khalifah ketiga Kekhalifahan Abbasiyah) dan al-Rasyid (Khalifah kelima dari Kekhalifahan Abbasiyah) atas orang Bizantium (Romawi Timur) musuh lama Islam memang telah membuat tenar periode itu. Begitu pula kehidupan mewah yang menjadi tren pada masa itu. Pada periode itu yang sangat terkenal adalah kemunculan gerakan intelektual dalam seluruh sejarah pemikiran dan budaya. Kebangkitan itu sebagian besar disebabkan oleh masuknya berbagai pengaruh asing, sebagian Indo-Persia dan Suriah dan yang paling penting Yunani. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun para sarjana Arab telah menyerap ilmu dan budaya yang dikembangkan selama berabad-abad oleh orang Yunani.²²

Berdasarkan data sejarah ini dapat disimpulkan bahwa kejayaan Islam (di masa Dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 750-1258 M menjadi dinasti terlama sepanjang berdirinya dinasti Islam).²³ Di masa lalu bukan karena sistem Khilafah dengan syairat Islam yang menjadi pedomannya melainkan karena budaya Arab yang lebih dahulu sebelum Islam ada lalu kemudian diikuti dengan sikap umat Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling sukses dalam mengembangkan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam yang berhasil menghantarkan Islam pada masa kejayaannya dibandingkan Barat yang ketika itu masih tertinggal dari Islam oleh karena Barat baru mengalami kejayaan ketika memasuki abad ke-18 yang disebut sebagai abad pencerahan yang dimulai dari revolusi industri dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang di Eropa.

Selain daripada itu jika sistem Khilafah dipaksakan untuk ditegakkan masa sekarang bukan berarti tanpa persoalan kemungkinan besar di waktu mendatang akan terjadi perebutan atau persaingan politik untuk merebut jabatan khalifah dan itu sudah dibuktikan pada dalam sejarah imperium Islam ketika Muawiyah melancarkan serangan fitnah kepada Ali dengan tujuan agar Muawiyah dapat menjadi khalifah sekaligus mendirikan imperium Islam diatas kepemimpinan Muawiyah atau kemungkinan lain ialah perebutan jabatan di antara keturunan khalifah. Meskipun Muawiyah menjadi khalifah beberapa wilayah Islam menolak mengakui otoritas khalifah Muawiyah.

Pemahaman Keagamaan Hizbut Tahrir

Salah satu karakteristik nalar keagamaan kelompok Islam militan adalah menggunakan pendekatan nalar literalis teks sebagai dasar pemikirannya. Pendekatan nalar literalis ini merupakan model pemikiran normatif bahwa semua dalam tatanan sosial kehidupan maupun pemikiran harus berangkat dari teks suci dan mengesampingkan campur tangan nalar manusia untuk mengatur kehidupan

²² *Ibid.*, 381-382.

²³ Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1995), 107.

dan pemikiran. Nalar literalis dan pemahaman tekstual Al-Qur'an dan hadis akan berimplikasi pada ekspresi keberagaman dan bisa menjadi eksklusif.²⁴ Dalam kelompok Islam militan mempunyai keyakinan absolut bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang paling benar dan sistem yang di bangun Islam merupakan aturan yang paling unggul di banding sistem hukum produk manusia. Sebagaimana di jelaskan sebelumnya bahwa nalar keagamaan Hizbut Tahrir adalah menolak filsafat, hurmeunetik, paham sekuler, kapitalis dan paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Al-Nabhani mengatakan apapun pemikiran yang tidak bersumber dari Islam harus ditolak dan sangat membahayakan umat Islam, karena dasar yang harus ditegakkan menurut Hizbut Tahrir adalah hukum syara', yang tidak tercampur dengan interpretasi yang menyesatkan sebagaimana dalam tesisnya.²⁵

Pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Keruntuhan Orde Baru (1998) Pancasila juga dianggap ikut runtuh karena rezim Soeharto memang memanfaatkannya guna mempertahankan kekuasaannya yang penuh KKN. Diabaikannya Pancasila itu terjadilah kekosongan ideologi. Kekosongan dimanfaatkan oleh berbagai ideologi dari luar bukan saja berbeda, melainkan juga bertentangan dengan Pancasila. Lalu munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempergunakan ruang kebebasan setelah reformasi itu dengan cerdas dengan menyampaikan doktrin tentang pentingnya khilafah menurut model abad ke-6 Masehi. Khilafah dalam bentuk pemerintahan yang meliputi seluruh dunia. Bagi Yewangoe jelas khilafah mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik yang berdasrakan Pancasila. Celaknya gerakan ini dengan dalil HAM dan kebebasan demokrasi, dibiarkan bergerak selama puluhan tahun dengan memasuki berbagai lembaga pendidikan.²⁶ Lebih lanjut Yewangoe katakan bahwa gerakan khilafah adalah gerakan politik yang sama sekali mengabaikan latar belakang sejarah perjuangan bangsa ini untuk menjadi satu bangsa. Dianggapnya bahwa hanya kelompok mereka yang berjuang dan karena itu memperoleh hak istimewa, sedangkan yang lainnya adalah kelompok yang sekadar "ditoleransi" menjadi warga negara kelas dua.²⁷

Melihat dari sejarahnya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan disebabkan karena terjadinya proses perjumpaan/ interaksi antar agama dan budaya di Indonesia. Perjumpaan ini didorong oleh berbagai kepentingan di antaranya politik, ekonomi, budaya maupun agama. Oleh karena kemajemukan merupakan proses yang alami di tengah proses perubahan zaman. Kesadaran inilah bahwa relaitas masyarakat Indonesia adalah plurilis,

²⁴ Azman, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Yewangoe, Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: Pengalaman dengan Allah dalam konteks Indonesia yang Berpancasila, *Op. Cit.*, 194.

²⁷ *Ibid.*, 370-371.

maka pendiri bangsa ini mendasarkan berdirinya bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila. Jelas HTI lebih dominan gerakan politik ketimbang agama. Sebab agama hanya menjadi agama alat untuk menarik dukungan politik dari masyarakat muslim di Indonesia untuk ikut mendorong terwujudnya khilafah di Indonesia.

Edi AH Iyubenu dalam bukunya *Islam yang Menyenangkan* menjelaskan bahwa perihal upaya menegakkan khilafah di Indonesia, jelas merupakan aktivitas makar yang melanggar hukum. Tidak peduli apa pun landasan dalilnya dan argumentasinya wacananya bila memicu keresahan dan pertikaian dalam masyarakat seyogianya kita semua bangkit untuk bersama-sama melindungi bangsa ini dari perpecahan tersebut.²⁸ Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil membubarkan HTI melalui perubahan Hukum dari UU/17/2013 ke perpu 2/2017.²⁹ Apakah tindakan pembubaran HTI mencederai HAM dan demokrasi? Memang ada yang berpendapat begitu. Pandangan Yewangoe sebagai advokasi tandingan adalah negara ini telah didirikan bersama laksana sebuah rumah yang fondasinya jelas yaitu Pancasila. Ini disepakati bersama. Jika memakai formulasi P4 Pancasila adalah “perjanjian luhur bangsa Indonesia” itu berarti kita tanpa terkecuali harus taat pada berbagai aturan yang berlaku di dalam rumah bersama itu.³⁰ Meskipun secara hukum organisasi ini telah bubar, namun roh semangat dari ideologi khilafah masih terus berkeliaran untuk mempengaruhi umat Islam untuk ikut terlibat dalam upaya memperjuangkan tegakknya khilafah di bumi Indonesia.³¹

Propaganda simpatisan HTI

Satu tahun yang lalu 2019 Yewangoe mendapatkan informasi dari Prof. Aqil Siroj bahwa ada pemuka agama radikal yang ketika itu sedang melakukan ceramah di salah satu masjid dan kemudian pemuka agama tersebut melontarkan pertanyaan kepada jemaahnya mana yang lebih tinggi Al-Quran atau Pancasila? Bagi Yewangoe pertanyaan ini seakan-akan ingin membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Jemaah yang hadir menjawab Al-Quran karena Al-Quran posisinya lebih tinggi dari Pancasila. Kalau demikian tinggalkan Pancasila. Bagi Yewangoe pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Namun maksud dari pertanyaan ini dilontarkan ingin mengubah cara berpikir jemaahnya terhadap Pancasila itu. Bagi Prof. Aqil Siroj Al-Quran tidak bertentangan dengan Pancasila dan begitu juga sebaliknya. Kemudian pemuka agama tersebut bertanya lagi mana yang lebih hebat Nabi Muhammad atau Jokowi? Jemaah yang hadir menjawab Nabi Muhammad kalau begitu tinggalkan Jokowi. [Bahkan ada lagi

²⁸ Edi AH Iyubenu, *Islam yang Menyenangkan Etika Kemanusiaan sebagai Puncak Keimanan dan Keislaman* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 39-40.

²⁹ Aritonang, *Loc. Cit.*

³⁰ Yewangoe, *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya: Pengalaman dengan Allah dalam konteks Indonesia yang Berpancasila*, *Op. Cit.*, 53.

³¹ Aritonang, *Loc. Cit.*

narsai lain yang diviralkan melalui media sosial yang kurang lebih isinya demikian ketika Nabi Muhammad dihina ia memaafkan tetapi kalau Jokowi dihina dikenakan sanksi hukum.] Bagi Yewangoe dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Jokowi bukanlah nabi. Lantas tidak pantas untuk menyandingkan Jokowi dengan Nabi Muhammad. Tetapi sengaja diangkat dengan tujuan supaya mereka meninggalkan Pancasila dan Jokowi.³² Menurut Gus Dur Pancasila sangat Islami dan tidak berseberangan.³³

Dalam pengamatan Akhmad Sahal (mantan direktur Freedom Institute, Jakarta) menjelaskan bahwa pergerakan pendukung khilafah sangat cerdas mengatasnamakan kampanyenya sebagai dakwah dan pengajian kalau pemerintahan Jokowi melarangnya langsung dicap anti-Islam. Pendukung Khilafah dengan cerdas memanfaatkan fasilitas demokrasi berupa kebebasan berekspresi untuk berbicara mengenai sistem khilafah di ruang publik. Bagi Akhmad, mereka berlindung dibalik jubah dakwah dan kebebasan berekspresi untuk memuluskan kampanye dan propaganda khilafah, yang sebenarnya bukan lagi aktivitas dakwah melainkan pengalangan dan pembentukan kekuatan. Ini bukan lagi ide, dan dakwah melainkan sudah berpolitik. Mereka ingin merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah.³⁴

Selain itu, baru-baru ini ada film dokumenter yang berjudul 'Jejak Khilafah di Nusantara' yang tayang di YouTube yang diblokir oleh pemerintah pada 20 Agustus 2020. Film itu bercerita mengenai hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara yang mempunyai kaitan erat dengan pemerintahan Khilafah Ustmaniyah Turki. Menurut Prof. Peter Carey Christopher Reinhart (seorang pakar sejarah) mengatakan: Klaim-klaim tersebut tidak benar dengan berbagai alasan ilmiahnya: (1) tidak ada bukti dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa 'negara' Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475-1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475-1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani. (2) kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa. (3) tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarki.³⁵ Bagi peneliti tujuan awal dari pembuatan film dokumenter tersebut ialah ingin melakukan propaganda politik seakan-akan bahwa kejayaan Islam di masa lampau semisal Ummayah, Abbasyiah, dan Utsmaniyah mempunyai akar historis yang mengakar di Nusantara sehingga

³² Wawancara Andreas A. Yewangoe, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05 WIB.

³³ Ebenhaizer Nuban Timo, *Meng-hari-ini-kan Injil di Bumi Pancasila Bergereja dengan Cita Rasa Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 171.

³⁴ Akhmad Sahal, Tujuan Pendukung Khilafah bukan Dakwah Tapi Merebut Kekuasaan, <https://www.youtube.com/watch?v=X5SP-edcVu8&t=208s>, diakses 11 september 2020.

³⁵ Hasbi Zainuddin, *Sudah Ditonton 278 Ribu Kali, Film, 'Jejak Khilafah' Diblokir Youtube atas Keluhan Pemerintah*, <https://terkini.id/news/sudah-ditonton-278-ribu-kali-film-jejak-khilafah-diblokir-youtube-atas-keluhan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

banyak masyarakat muslim yang pada akhirnya mengikuti dan menganut ideologi HTI padahal film dokumenter tersebut tidak memiliki bukti dokumenter kesejarahan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HTI adalah gerakan politik transnasional yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di abad ke-6. Meskipun HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017. Namun roh HTI masih 'bergentayangan' di Indonesia oleh karena selama 19 tahun HTI dibiarkan untuk melebarkan pengaruhnya di tengah masyarakat. Hal ini terbukti dari info yang diterima Yewangoe dari Prof. Aqil Siroj dimana seorang penceramah radikal hendak mengubah cara berpikir umat dengan membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad dengan Jokowi. Tujuan dari narasi ini dibangun ialah ingin membuat umat Islam yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia menjadi tidak menghiraukan Pancasila dan segala aturan dibentuk oleh pemerintah. Umat Islam akan mulai berpikir untuk mencari sistem yang baru untuk bangsanya. Umat Islam meyakini bahwa ketika pemuka agama berceramah kepada jemaahnya mereka memahami itu sebagai kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Ada juga kelompok simpatisan HTI yang justru memanfaatkan fasilitas demokrasi dan kebebasan berespresi untuk mensosialisasikan wacana sistem khilafah di ruang publik dengan berlingkungan dibalik kegiatan dakwah. Tujuan mereka berdakwah tidak lain selain tujuan politik. Selain itu propaganda khilafah juga dilakukan dengan dibuatnya film 'Jejak Khilafah di Nusantara'. Film tersebut tidak berisikan bukti sejarah yang valid itu yang dengan tujuan agar masyarakat Indonesia terpengaruh dan ingin menghidupkan kembali kejayaan Islam secara politik masa kini. Jelas gerakan propaganda dari para simpatisan HTI tidak boleh dianggap rendah sebab jika hal ini dibiarkan ini dapat mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu pemerintah seharusnya memberikan ancaman sanksi hukuman terhadap segala bentuk aktivitas propaganda ideologi khilafah di Indonesia.

Kesimpulan

Sejarah awal masuknya HT ke Indonesia pada tahun 1982-1983 yang dibawa melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota HT dari Yordania. Sejak kedatangan M. Mustofa (adalah warga Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Yordania) dan Abdurrahman Al-Baghdadi (adalah warga negara Libanon, kemudian pindah ke Australia yang pada akhirnya menetap di Indonesia) di tujuan dari misi mereka ialah menyebarluaskan ideologi HT/ khilafah. Mula-mula ideologi ini diperkenalkan kepada mahasiswa IPB. Aktivitas mereka ketika itu berjalan secara tertutup selama 10 tahun. Sebab ketika itu pemerintahan rezim Soeharto sangat melarang keras segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Paska Orde Baru gerakan yang semula tertutup menjadi terang-terangan dilakukan ke berbagai kampus melalui Lembaga Dakwah

Kampus (LDK). Singkatnya, gerakan ini mendapatkan sebuah legitimasi hukum dari pemerintah menjadi Hizbut Tahrir Indonesia/HTI. Gerakan ini pada akhirnya mendapatkan dukungan dan pengikut yang tidak sedikit sehingga 12 Agustus 2007 organisasi HTI menuntut direalisasikannya sistem khilafah di seluruh dunia yang dimulai dari Indonesia.

Gerakan HTI seakan dibiarkan secara leluasa untuk menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia selama 19 tahun terhitung sejak era reformasi bergulir belum lagi ditambah ketika pengikut HTI melakukan pergerakannya secara tertutup di era orde baru selama 10. Melihat akan tumbuh suburnya gerakan HTI yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia. Maka pada 2017 dibawah pemeritahan Presiden Jokowi organisasi ini resmi dibubarkan. Meskipun telah dibubarkan tetapi roh semangat dari para simpatisan HTI masih terus berkeliaran untuk mempengaruhi umat Islam untuk mendukung terwujudnya khilafah di bumi Indonesia.

Paska dibubarkannya oleh pemerintah, para simpatisan HTI terus melakukan aktivitas propaganda dengan berbagai cara diantaranya: (1) narasi-narasi yang dibangun oleh penceramah HTI di masjid-masjid yang dengan tujuan agar umat Islam menjadi tidak taat terhadap pemerintah yang sah dan Pancasila, (2) pemanfaatan fasilitas demokrasi dan kebebasan bereskpresi dengan mensosialisakan wacana sistem Khilafah di Indonesia yang dibungkus dengan kegiatan dakwah padahal tujuannya ialah politik yang ingin merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah, (2) melalui pembuatan film dokumenter yang berjudul 'Jejak Khilafah di Nusantara' konten dari film tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan film ini dibuat ialah agar hati dari umat Islam dapat terdorong untuk menghidupkan kembali di masa kinijejak-jejak kejayaan Islam di Nusantara. Menyikapi akan tersebut pemerintah tidak boleh memandang rendah gerakan dari simpatisan HTI jika dibiarkan dapat menjadi gelombang besar maka dengan demikian pemerintah harus memberikan ancaman sanksi hukuman terhadap aktivitas propaganda ideologi khilafah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- al-Amin, Ainur Rafiq. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Aritonang, Arthur. *Kekristenan dan Nasionalisme di Indonesia*. Jurnal Amanat Agung, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Azman. *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia: Al-daulah*. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 7 No.1, 2018.

- Hayati, Nilda. *Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living al-Quran Perspektif Komunikasi: Episteme* Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs; From the Earliest Times to the Present* terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Husni, Zainul Mu'ien. "NU di tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional." *Jurnal Islam Nusantra*, Vol. 02 No.1, 2018.
- Iyubenu, Edi AH. *Islam yang Menyenangkan Etika Kemanusiaan sebagai Puncak Keimanan dan Keislaman*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Sitompul, Einar M. *Dinamika Islam Indonesia: Model Perjumpaan dengan Umat Islam dalam Misi Baru dalam Kemajemukan Teologi Lintas-Iman dan Lintas-Budaya Buku Penghormatan 80 Tahun Prof. Dr. Olaf Schumann*. Tomohon: UKIT Press, 2018.
- Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*. Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.
- Timo, Ebenhaizer Nuban. *Meng-hari-ni-kan Injil di Bumi Pancasila Bergereja dengan Cita Rasa Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017
- Yewangoe, Andreas A. *Allah Mengizinkan Manusia Mengalami Diri-Nya Pengalaman dengan Allah dalam Konteks yang Berpancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- _____. *Tidak Ada Ghetto Gereja di dalam Dunia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

Interview

Wawancara oleh penulis, Andreas A. Yewangoe, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05 WIB.

Daftar Laman

- Mohammad Makmun Rasyid, *Sejarah dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, <http://digilib.uinsby.ac.id/19150/7/Bab%203.pdf>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.
- Akhmad Sahal, *Tujuan Pendukung Khilafah bukan Dakwah Tapi Merebut Kekuasaan*, <https://www.youtube.com/watch?v=X5SP-edcVu8&t=208s>, diakses 11 september 2020.
- Hasbi Zainuddin, Sudah Ditonton 278 Ribu Kali, Film, 'Jejak Khilafah' Diblokir Youtube atas Keluhan Pemerintah, <https://terkini.id/news/sudah-ditonton-278-ribu-kali-film-jejak-khilafah-diblokir-youtube-atas-keluhan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.